

Analisis Laporan Keuangan Di Kantor Bappeda Kabupaten Lombok Barat

¹Baiq Reinelda Tri Yunarni, ²Dedy Iswanto ³ Abdul Hafiz
Universitas Muhammadiyah Mataram

[1reineldayunarni@ummat.ac.id](mailto:reineldayunarni@ummat.ac.id) [2Dedy.Iswanto@ummat.ac.id](mailto:Dedy.Iswanto@ummat.ac.id) [3Abdulhafiz@gmail.com](mailto:Abdulhafiz@gmail.com)

ABSTRACT

This research is entitled Analysis of Financial Statements at the Bappeda Office of West Lombok Regency. The purpose of this study is to find out the 2017-2019 Bappeda Lombok Barat Report using the Liquidity and Solvency ratio. Financial statements are information that describes the financial condition of a company and furthermore this information can be used as a description of the company's performance. Analysis of financial statements in public sector organizations is done by comparing the financial performance of one period with the previous period based on financial statements, there are various types of ratios, namely liquidity ratios, solvency ratios, activity ratios, probability ratios, and growth ratios. The method used in this research is quantitative-qualitative using a deductive approach and analysis using Liquidity Ratios and Solvency Ratios, the current ratio of the Regional Development Planning Agency Office for 2017-2019 shows that in 2014 the current ratio was 667.50% in 2018 it decreased to 592.62 % or (74.88%) then experienced a significant increase in 2019 by 932.84% or an increase of 340.22%. Quick Ratio/Quick Ratio 2017 Quick Ratio/Quick Ratio of 264.91% in 2018 decreased by 170.31% or by 94.61% and then experienced a significant increase in 2019 by 524.25% or by 353.94%. In 2017-2019 based on Solvency Ratio analysis, in 2017-2019 the West Lombok Regional Development Planning Agency was able to pay all its debts then in 2019 it decreased by 0.02 and an average of 0.09%. The results of the calculation of the debt ratio in 2019 decreased by 0.02 and an average of 0.09%.

Keywords: Financial Report, Bappeda West Lombok

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Laporan Keuangan Di Kantor Bappeda Kabupaten Lombok Barat. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Laporan Bappeda Lombok Barat tahun 2017-2019 Menggunakan rasio Likuiditas dan Solvabilitas. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja perusahaan tersebut. Analisis laporan keuangan pada organisasi sector publik dilakukan dengan cara membandingkan kinerja keuangan satu periode dengan periode sebelumnya berdasarkan laporan keuangan, terdapat berbagai jenis rasio yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio probabilitas, dan rasio pertumbuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif dan analisis menggunakan Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas, Rasio lancar Kantor Badan Perencana Pembangunan Daerah Tahun 2017-2019 menunjukkan pada tahun 2014 rasio lancar sebesar 667.50% pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 592.62% atau (74.88%) kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 sebesar 932.84% atau terjadi peningkatan 340.22%. Quick Ratio/Rasio Cepat 2017 Quick Ratio/Rasio Cepat sebesar 264.91% pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 170.31% atau sebesar 94.61% dan kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 sebesar 524.25% atau sebesar 353.94%. Tahun 2017-2019 berdasarkan analisis Rasio Solvabilitas yaitu pada tahun 2017-2019 Badan Perencana Pembangunan Daerah Lombok Barat mampu membayar seluruh hutangnya kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0.02 dan rata-rata sebesar 0.09%. Hasil perhitungan rasio utang tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0.02 dan Rata-rata sebesar 0.09%.

Kata kunci: Laporan Keuangan, Bappeda Lombok Barat

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan manifestasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya yang sistematis. Sasaran dasar pembangunan pada akhirnya adalah penguasaan atas sumber daya (Pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berprastisipasi dalam kegiatan bermasyarakat dan kegiatan ekonomi). Pembangunan menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh rangkaian dan kegiatan pembangunan.

Dengan direvisinya UU No. 22 tahun 1999 ke UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 ke UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah dan pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran yang sesuai dengan kepentingan daerahnya masing-masing. Karena masing-masing daerah diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggara otonomi daerah.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo,2004:182)

Meningkatnya perekonomian suatu daerah merupakan gambaran pengelolaan keuangan yang efisien dengan memaksimalkan berbagai sektor perekonomian yang dimiliki. Sektor-sektor perekonomian yang terkelola dengan maksimal dan serasi tentu akan memberi efek aggregate terhadap peningkatan perekonomian. Pembangunan daerah dengan memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan sebuah daerah yang nantinya akan memberi kemampuan kepada sebuah daerah untuk semakin mandiri dalam sektor pendapatan yang tentunya akan mensahjeterakan masyarakat daerah tersebut, melalui peningkatan pembangunan serta ketersediaan dana yang mencukupi dalam tatanan keuangan daerah untuk terus menggenjot perekonomian.

Sebuah pembangunan ekonomi adalah proses dimana pemerintah masyarakat serta pihak terkait mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang secara maksimal serta membentuk lapangan kerja baru guna memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi didalam wilayah tersebut dewasa ini diberbagai daerah masih belum bisa mengelola dengan maksimal sektor-sektor perekonomian yang dimiliki dan masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah Asli (PAD) yang masih tergolong rendah membuat pemerintah daerah belum bisa meningkatkan kemandiriannya yang berimbas pada pembangunan yang dilakukan didaerah yang bersangkutan sehingga masih tingginya tingkat kemiskinan yang dimiliki didaerah, karena kurangnya kesempatan kerja sedikit investor yang ingin menanamkan modalnya sebuah daerah yang dimiliki daerah, karena kurangnya kesempatan kerja dan sedikitnya investor yang ingin menanamkan modalnya disebuah daerah yang belum bisa menyediakan sarana dan prasarana investasi yang memadai. Akibatnya pemerintah pusat harus rela menanggung beban pengeluaran sebuah daerah dengan kucuran dana transfer untuk meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah digulirkan pada 1 januari 2001. Adanya undang-undang tersebut telah mengakibatkan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah dari paradigma sentralistis ke arah desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah. Hal ini tentu menjadi jalan bagi pemerintah daerah

untuk lebih memaksimal dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya.

Analisis laporan keuangan pada organisasi sektor publik dilakukan dengan cara membandingkan kinerja keuangan satu periode dengan periode sebelumnya berdasarkan laporan keuangan, terdapat berbagai jenis rasio yaitu rasio likuiditas, rasio solvaliditas, rasio aktivitas, rasio profalibilitas dan rasio pertumbuhan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan organisasi sektor publik, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana kinerja keuangan tiap tahunnya. Kinerja keuangan pemerintah menjadi point penting serta topik yang menarik untuk diteliti.

Hal ini dikarenakan, dengan meneliti kinerja keuangan pemerintah dapat diketahui hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah pemerintah sudah baik menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanahkan oleh rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 7 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah, serta peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah, peraturan pemerintah nomor 7 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi pemerintah dan peraturan daerah nomor 5 Tahun 2007 Tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah, eraturan Bupati nomoe 25 Tahun 2014 Tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, kepala SKPB selaku pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya serta menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan realisasi anggaran (LRA), Neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasi terwujud dalam suatu instansi dapat dilihat melalui seberapa besar pemenuhan pada belanja kegiatan yang digunakan oleh instansi. Misalnya dengan melihat pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasioan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik atau tidak. Pengukuran kinerjanya dapat menggunakan analisis pertumbuhan belanja. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan analisis keserasian belanja yang bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja salah satunya adalah dengan menilai rasio belanja operasional terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal, pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan rasio Efisiensi belanja pengukuran kinerja anggaran yang dibutuhkan untuk menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah yang digunakan oleh instansi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan Deduktif Yang sebagai penarikan fakta-fakta umum kekhusus. Pendekatan Deduktif merupakan proses penalaran yang melibatkan pencapaian Kesimpulan dari seperangkat proposisi bersyarat atau dari sebuah Pasangan silogisme premis-premis. Pendekatan kuantitatif lebih menekankan pada pendekatan deduktif, sehingga persoalannya berkaitan dengan perbandingan-perbandingan atau hubungan satu sama yang lain, hanya sebatas perbandingan tidak mengetahui lebih dalam (Ruslanaja 2011).

Penelitian kuantitatif yaitu data penelitian yang berupa angka- Angka dan analisis menggunakan Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Sedangkan Penelitian Kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. Lombok Barat, data yang Di gunakan untuk mengumpulkan data berupa Neraca yaitu dengan Menggunakan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur laporan keuangan belanja Kantor Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat menggunakan Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Berikut ini adalah perhitungan rasio likuitidas Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat Tahun 2017-2019 (Irham Fahmi 2015)

Rasio Lancar / Current Ratio Current ratio atau rasio lancar adalah kemampuan suatu Perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Besar ratio yang ideal belum ada suatu patokan yang pasti Namun Bambang Riyanto Mengatakan apabila suatu perusahaan Menetapkan bahwa Current ratio yang harus dipertahankan adalah 3:1 atau 300%, ini berarti bahwa setiap utang lancar sebesar Rp 1,00 harus dijamin dengan aktiva lancar Rp 3,00 (Irham Fahmi 2015)

$$\text{Rumus Current Ratio Aset Lancar Utang Lancar} \times 100\% = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Utang lancar}} \times 100\%$$

a. Rasio Lancar/ Current Ratio Tahun 2017 Current Ratio = Aset

$$\text{Lancar Utang} < \text{ancar} \times 100\% = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang <ancar}} \times 100\%$$

$$= 132.843.33019.901.453 \times 100\%$$

$$= 6.675056841 \times 100\%$$

$$= 667.50\%$$

b. Rasio Lancar/Current Ratio Tahun 2018 Current Ratio = Aset

$$\text{Lancar Utang lancar} \times 100\%$$

$$=147.990.98324.972.270 \times 100\%$$

$$=5.926212675 \times 100\%$$

$$=592.62\%$$

c. Rasio Lancar / Current Ratio Tahun 2019 Current Ratio = Aset Lancar Utang lancar x100%

$$=153.734.04016.480.206 \times 100\%$$

$$=9.32840524 \times 100\%$$

$$=932.84\%$$

Laporan keuangan Badan Perencana Pembangunan Daerah Lombok Barat

Tahun	Aset Lancar (Rp)	Utang Lancar (Rp)	Current Ratio (%)	Perubahan(%)	Kondisi
2017	132.843.330	19.901.453	667.50%	-	Likuid
2018	147.990.983	24.972.270	592.62%	-74.88%	Likuid
2019	153.734.040	16.480.206	932.84%	340.22%	Likuid
Rata-Rata			730.98%	-	Likuid

Sumber: Laporan Keuangan Badan Perencana Pembangunan Daerah Lombok Barat. Tahun 2017-2019 (Data sekunder yang diolah).

Rasio lancar Badan Perencana Pembangunan Daerah Lombok Barat Tahun 2017 dalam Tabel 4.1 sebesar 667.50%. Hal ini Menunjukkan Keuangan Badan perencana pembangunan daerah lombok barat Tahun 2017 lancar. Karena menurut Bambang Riyanto untuk Standar yang digunakan rasio lancar dianggap aman adalah 300% Atau 3:1. Rasio lancar Badan perencana pembangunan daerah Lombok barat Tahun 2017 sebesar 667.50% Artinya bahwa jumlah aktiva lancar Aset lancarnya yang dimiliki Badan perencana pembangunan daerah lombok barat

sebesar 667.50%. kali utang lancarnya atau setiap Rp1 utang lancar dijamin dengan 667.50% aset lancar. Rasio lancar Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat Tahun 2018 dalam tabel 4.1 sebesar 592.62%. Hal ini menunjukkan Keuangan Badan perencanaan pembangunan daerah Tahun2018 lancar. Rasio lancar Tahun 2018 sebesar 592.62% artinya bahwa jumlah aktiva lancar Aset lancarnya yang dimiliki Badan Perencana pembangunan daerah lombok barat Tahun 2018 sebesar 592.62%. kali utang lancar atau setiap Rp 1 utang lancar dijamin dengan 592.62% aset lancar. Rasio lancar Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat Tahun 2018 dalam tabel 4.1 sebesar 932.84%. Hal ini menunjukkan Keuangan badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat Tahun2018 lancar. Rasio lancar Tahun 2018 sebesar 932.84% artinya bahwa Jumlah aktiva lancar Aset lancarnya yang dimiliki Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat sebesar 932.84%. kali utang lancar Atau setiap Rp 1 utang lancar dijamin dengan 932.84% aset lancar. Kesimpulan dari rasio lancar Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat Tahun 2017-2019 menunjukkan pada Tahun 2017 Rasio lancar sebesar 667.50%, pada Tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar 592.62% atau (74.88%) kemudian mengalami Peningkatan yang cukup signifikan pada Tahun 2019 sebesar 932.84% atau terjadi peningkatan 340.22%. Hal ini menunjukkan Bahwa Kinerja Keuangan Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat Tahun 2017-2019 tidak stabil tetapi masih berada diatas Standar atau masih bisa dikatakan likuid. Sehingga dapat dilihat dalam 3 tahun terakhir rata-rata rasio lancar (*Currentratio*) yang dihasilkan oleh Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat sebesar730.98% artinya dari hasil rata-rata tersebut mampu menjamin utang ketika jatuh tempo.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio ini disebut juga rasio yang melihat perbandingan Utang perusahaan ,yaitu diperoleh dari perbandingan total utang Dibagi dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar Aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar Hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumus Debt Rasio: $\text{Total Utang Total Aset} \times 100\%$

a. *Debt to total asset* dan Debt Rasio Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Debt Rasio} &= \text{Total Utang Total Aset} \times 100\% \\ &= 19.901.45319.738.439.638 \times 100\% \\ &= 0.001008259 \times 100\% \\ &= 0.1\% \end{aligned}$$

b. *Debt to total asset* dan Debt Rasio Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Debt Rasio} &= \text{Total Utang Tota _Aset} \times 100\% \\ &= 24.972.27019.913.252.038 \times 100\% \\ &= 0.001254053 \times 100\% \\ &= 0.1\% \end{aligned}$$

c. *Debt to total asset* dan Debt Rasio Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Debt Rasio} &= \text{Total Utang Total Aset} \times 100\% \\ &= 16.480.20619.601.032.181 \times 100\% \\ &= 0.000840783 \times 100\% \\ &= 0.08\% \end{aligned}$$

Laporan Keuangan Badan Perencana Pembangunan Daerah Lombok Barat

Tahun	Total Utang (Rp)	Total Aset (Rp)	Debt Ratio (%)	Perubahan (%)	Kondisi
2017	19.901.453	19.738.439.638	0.1 %	-	Baik
2018	24.972.270	19.913.252.038	0.1 %	-	Baik
2019	16.480.206	19.601.032.181	0.08 %	0.02%	Baik
Rata-Rata			0.09%		

Sumber: Laporan Keuangan Badan Perencana Pembangunan Daerah Lombok Barat Tahun 2017-2019. (Data sekunder yang diolah)

Rasio Debt ratio Kantor Badan perecana pembangunan daerah lombok barat Tahun 2017 dalam tabel 4.3 Sebesar 0.1% menunjukkan bahwa setiap Rp 0.1 aktiva menjamin Rp 1 utang Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat. Hal ini menunjukkan bahwa total aktiva Tahun 2017 sebesar Rp 19.738.439.638 lebih besar dari total utang Rp19.901.453.

Rasio Debt rasio Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat Tahun 2018 dalam tabel 4.3 Sebesar 0.1% menunjukkan bahwa setiap Rp 0.1 aktiva menjamin Rp 1 utang Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat. Hal ini menunjukkan bahwa total aktiva Tahun 2018 sebesar Rp 19.913.252.038 lebih besar dari total utang Rp 24.972.270. Debt rasio Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat Tahun 2019 dalam tabel 4.3 Sebesar 0.08% Menunjukkan bahwa setiap Rp 0.08 aktiva menjamin Rp 1 utang Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat, hal ini menunjukkan bahwa total aktiva Tahun 2019 sebesar Rp 19.601.032.181 lebih besar dari total utang Rp 16.480.206. Kesimpulan dari hasil perhitungan Debt rasio Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2017-2019 menunjukkan pada Tahun 2017-2018 Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat mampu membayar seluruh hutangnya kemudian pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 0.02% dan rata-rata sebesar 0.09%. Hal ini menunjukkan keadaan Keuangan Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat Tidak stabil akan tetapi Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat Mampu dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya karena Semakin kecil rasionya semakin aman (Solvable). Porsi hutang Terhadap aktiva harus lebih kecil.

Dengan demikian hal ini menunjukkan keadaan Keuangan Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat Tidak stabil akan tetapi hal ini menunjukkan hanya sebgai kecil ekuitas dana yang di Bebani utang maka semakin aman.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Laporan Keuangan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lombok Barat Tahun 2017-2019 berdasarkan analisis Rasio Likuiditas yaitu: Rasio lancar Kantor Badan perencanaan pembangunan Daerah Tahun 2017 2019 menunjukkan pada Tahun 2014 rasio lancar sebesar 667.50%, pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 592.62% atau (74.88%) kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Tahun 2019b sebesar 932.84% atau terjadi peningkatan 340.22%. Hal ini

menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat tahun 2017-2019 tidak stabil tetapi masih berada diatas standar atau masih bisa dikatakan likuid. Sehingga dapat dilihat dalam 3 tahun terakhir rata-rata rasio lancar (Current ratio) yang dihasilkan oleh Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat sebesar 730.98% artinya dari hasil rata-rata tersebut mampu menjamin utang ketika jatuh tempo. Quick Ratio/Rasio Cepat Kantor badan perencanaan pembangunan daerah tahun 2017-2019 menunjukkan pada tahun 2017 Quick Ratio/Rasio Cepat sebesar 264.91%, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 170.31% atau sebesar 94.61% dan kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 sebesar 524.25% atau sebesar 353.94%. Hal Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat tahun 2017-2018 tidak stabil Tetapi masih berada diatas standar atau masih mampu Membayar hutang jangka pendek yang jatuh tempo. Sehingga dapat dilihat dalam 3 tahun terakhir rata-rata Quick Ratio/Rasio Cepat yang dihasilkan oleh Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat sebesar 319.82% artinya dari rata-rata tersebut mampu menjamin utang lancar.

Laporan Keuangan Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat Tahun 2017-2019 berdasarkan analisis Rasio solvabilitas yaitu: Hasil perhitungan Debt rasio Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat Tahun 2017-2019 menunjukkan Pada Tahun 2017-2019 Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat mampu membayar seluruh Hutangnya kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan Sebesar 0.02% dan Rata-rata sebesar 0.09%. Hal ini Menunjukkan keadaan Badan perencanaan pembangunan daerah Tidak stabil akan tetapi Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat Mampu dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya karena Semakin kecil rasionya semakin aman (Solvable). Porsi hutang Terhadap aktiva harus lebih kecil. Hasil perhitungan rasio utang terhadap ekuitas Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat Tahun 2014- 2016 menunjukkan pada Tahun 2017-2018 Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat mampu membayar Seluruh hutangnya

kemudian pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 0.02 dan Rata-rata sebesar 0.09%. Hal ini Menunjukkan keadaan Keuangan Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah lombok barat Tidak stabil akan tetapi Hal ini menunjukkan hanya sebagaian kecil ekuitas dana yang di Bebani utang maka semakin aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrin, Assidiqi. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah* (APBD). 2014. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dewi, Sartika. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA)* 2018. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Zitri, I., Rifaid, R., & Lestanata, Y. (2020). Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2(2), 164-190.
- Zitri, I. (2019). AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1(1), 64-81.
- Fahmi, Irham. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kantor Badan Perencana Pembangunan Daerah kabupaten Lombok Barat. 2017. *Laporan Keuangan*.
- Kantor Badan Perencana Pembangunan Daerah kabupaten Lombok Barat. 2018. *Laporan Keuangan*.
- Kantor Badan Perencana Pembangunan Daerah kabupaten Lombok Barat. 2019. *Laporan Keuangan*.
- Marsel, Pongoh. *Analisis Laporan Keuangan Untuk menilai Kinerja Keuangan pt. Bumi Resources TBK*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Ratulangi Manado. Vol. 1 No. 03 September 2013.
- Mardiasmo. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- Mirza, Rifka Amalia. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2005 sampai tahun 2010*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Diunduh Melalui: https://eprints.undip.ac.id/skripsi_Mirza.pdf. (22/06/2020)
- Purwanti, Sri. 2009. *Analisis Laporan Keuangan pada KPPN Sukarta tahun anggaran 2006_2008*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Jurusan Diploma III Akuntansi. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Diunduh Melalui: <https://eprints.uns.ac.id.pdf> (22/06/2020).
- Ruslanaja. 2011. Penalaran deduktif induktif analogi metode penelitian. <http://www.kompasiana.com>. (23/06/2020)
- Soemarso. 2002. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Syamsuddin, Lukman. 2007. *Manajemen keuangan perusahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Sugiyono. 2017. *Metode kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wayan, pantiyasa. 2013. *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta